

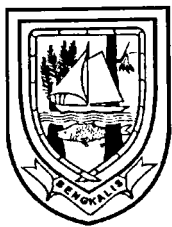


PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KECAMATAN
BENGKALIS KABUPATEN
BENGKALIS**

NOMOR : 700/ITDA/LHR/VII/2022/719

TANGGAL : 29 JULI 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Antara No. Telp. (0766) 22054 Fax. (0766) 21023
BENGKALIS

Kode Pos 28751

Bengkalis, 29 Juli 2022

Nomor : LHE-SAKIP/ITDA-SET/VII/2022/719
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kecamatan Bengkalis Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021

Kepada Yth.:
Camat Bengkalis
di -
Bengkalis

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Bengkalis tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
- e. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 700/SPT/ITDA-SET/VII/2022/386 tanggal 17 Juli 2022 tentang Evaluasi atas Kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.



LHE SAKIP 2021

2. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2021 adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- e. Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2021, meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras.
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP.
- e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

4. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2021 menggunakan metodologi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data
- b. Wawancara
- c. Konfirmasi

5. Kriteria dan Predikat Penilaian

Adapun Predikat Nilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

No	Predikat	Nilai Angka	Interprestasi Predikat
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4.	B	>60 - 70	Baik
5.	CC	>50 - 60	Cukup
6.	C	>30 - 50	Kurang
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang

6. Uraian Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kecamatan Bengkalis memperoleh skor 61,06 dari nilai maksimum 100 atau predikat B (Baik).

Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Bengkalis digambarkan pada tabel berikut ini :

No	Komponen yang Dinilai	Predikat Nilai Tahun 2020		Predikat Nilai Tahun 2021	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,28	30	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	25	11,25	30	19,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,32	15	10,35
4.	Evaluasi Internal	10	5,25	25	9,00
5.	Capaian Kinerja	20	12,34	-	-
Jumlah		100	60,44	100	61,06
Nilai akuntabilitas Kinerja		-	60,44	-	61,06
Predikat Akuntabilitas Kinerja		-	B (Baik)	-	B (Baik)

Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai	% Capaian
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	22,20	74,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,30	70,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50	70,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	19,50	65,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	3,60	60,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	5,40	60,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50	70,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	10,35	69,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15	70,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	4,50	60,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	9,00	36,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,00	60,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	2,25	30,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	3,75	30,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			61,06	

Berdasarkan persentase capaian sebagaimana tertuang pada tabel diatas, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1) Perencanaan Kinerja

a) Kualitas Perencanaan Kinerja

- Cascading yang telah disusun belum sepenuhnya menunjukkan adanya upaya perbaikan penyelarasan sasaran yang lebih tinggi ke sasaran yang dibawahnya.
- Cascading yang telah disusun belum seluruhnya menggambarkan prinsip-prinsip logis sebab akibat dalam pencapaian kinerja

b) Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

- Belum tersedianya dokumen administrasi terkait kegiatan pemantauan/monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja atas rencana aksi kinerja.

2) Pengukuran Kinerja

a) Pemenuhan Pengukuran

- Belum tersedianya SOP atau dokumen lainnya yang disamakan tentang pengumpulan data kinerja.

b) Kualitas Pengukuran

- Belum tersedianya dokumen administrasi terkait keterlibatan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam pengukuran kinerja beserta pemantauannya.
- Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung dan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- Belum tersedianya dokumen administrasi terkait pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

c) Pemanfaatan Pengukuran

- Belum terdapat data hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi beserta tindaklanjutnya.

3) Pelaporan Kinerja.

a) Penyajian Informasi Kinerja

- Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

b) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

- Pemanfaatan informasi Kinerja belum dilengkapi dengan informasi yang memadai/ belum menyeluruh untuk perbaikan perencanaan.
- Pemanfaatan Informasi kinerja belum dilengkapi dengan informasi yang memadai/ belum menyeluruh untuk perbaikan pelaksanaan progam dan kegiatan organisasi.
- Pemanfaatan informasi Kinerja belum dilengkapi dengan informasi yang memadai/ belum menyeluruh untuk perbaikan kinerja.
- Pemanfaatan informasi Kinerja belum dilengkapi dengan informasi yang memadai/ belum menyeluruh untuk penilaian kinerja.

4) Evaluasi Kinerja.

a) Pemenuhan Evaluasi.

- Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan, namun belum dilengkapi dengan dokumen hasil evaluasi atas rencana aksi.

b) Kualitas Evaluasi.

- Pemantauan rencana aksi telah dilakukan secara triwulan, namun belum sepenuhnya dilakukan dalam mengendalikan kinerja dan belum adanya alternatif perbaikan yang diberikan.

c) Pemanfaatan Evaluasi.

- Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
- Hasil evaluasi atas rencana aksi secara tertulis belum ada, namun monitoring atas rencana aksi telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

7. Rekomendasi

Sehubungan belum memadainya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, kami merekomendasikan kepada Camat Bengkalis agar :

1) Perencanaan Kinerja

- Cascading yang telah disusun harus memuat upaya perbaikan penyelarasan sasaran yang lebih tinggi ke sasaran yang dibawahnya.
- Cascading yang telah disusun harus menggambarkan prinsip-prinsip logis sebab akibat dalam pencapaian kinerja.
- Mendokumentasikan kegiatan pemantauan/monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja atas rencana aksi kinerja.

2) Pengukuran Kinerja

- Menyusun SOP atau dokumen lainnya yang disamakan tentang teknis pengumpulan data kinerja.
- Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam pengukuran kinerja.
- Data kinerja yang dikumpulkan dapat mendukung dan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- Mendokumentasikan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- Menyusun data hasil pengukuran rencana aksi beserta tindaklanjutnya.

3) Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- Pemanfaatan informasi Kinerja dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan progam dan kegiatan organisasi, perbaikan kinerja dan penilaian kinerja.

4) Evaluasi Kinerja

- Melakukan dan mendokumentasikan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi.
- Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi per triwulan dan digunakan untuk mengendalikan kinerja dan menyusun alternatif perbaikan.
- Hasil evaluasi rencana aksi didokumentasikan, ditindaklanjuti dan dilakukan monitoring secara tertulis.

8. Penutup

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH,

H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710522 199101 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Bupati Bengkulu (sebagai laporan)